BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu elemen penggerak utama perekonomian Indonesia. Hal ini yang menjadikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarifuddin Hasan (2013), menilai bahwa sektor ini akan menjadi sektor yang paling mendapat perhatian oleh pemerintah. Hingga saat ini sudah terdapat 56,5 juta unit UMKM di semester satu tahun 2013. Angka itu terus meningkat dari tahun ke tahun dan diperkirakan akan terus berlanjut hingga beberapa tahun mendatang.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah memiliki kemampuan untuk menyelamatkan roda perekonomian nasional, terlihat dari kontribusinya pada Produk Domestik Bruto (PDB) serta menciptakan lapangan pekerjaan. Pada tahun 2009 tercatat kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai sekitar 45% atau senilai Rp 2.000 triliun, sedangkan tahun 2010 diperkirakan UMKM mampu memberikan kontribusi lebih besar lagi kepada PDB indonesia yakni sekitar Rp 3.000 triliun. Besarnya kontribusi juga terlihat dari tingginya penyerapan tenaga kerja dari sektor UMKM ini, yaitu hingga tahun 2009 sebanyak 91,8 juta atau 97,3% dari seluruh tenaga kerja di Indonesia (Departemen Koperasi 2010)

Perkembangan sektor UMKM yang demikian pesat memperlihatkan bahwa terdapat potensi yang besar jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik yang tentunya akan dapat mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Sementara itu, di sisi yang lain UMKM juga masih dihadapkan pada masalah yang terletak pada proses administrasi. Masalah utama dalam pengembangan UMKM yaitu mengenai pengelolaan keuangan dalam usahanya tersebut, karena pengelolaan yang baik memerlukan keterampilan akuntansi yang baik pula oleh pelaku bisnis UMKM (Undang-Undang UMKM No 20 Tahun 2008).

Kewajiban menyelenggarakan pencatatan akuntansi yang baik bagi UMKM di Indonesia sebenarnya telah tersirat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Namun dalam prakteknya, mayoritas pemilik UMKM jarang mengadministrasikan penerimaan dan pengeluaran dengan bukti tertulis otentik. Sehingga kesulitan untuk menghitung omset dan laba bersih secara tepat dengan menggunakan kaidah pembukuan (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Pembukuan merupakan bagian dari akuntansi yaitu proses mencatat, sedangkan akuntansi mencakup juga identifikasi dan komunikasi. Catatan-catatan akuntansi yang baik dalam bisnis kecil diperlukan untuk tujuan internal maupun eksternal. Kurangnya pemahaman manajemen keuangan adalah beberapa masalah utama yang menyebabkan kegagalan perusahaan kecil. Banyak perusahaan kecil yang mengalami kegagalan karena kurang memahami manajemen keuangan dan pembelanjaan. (Andreas, 2011)

Rizki dan Sylvia Veronica (2012) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa Kualitas laporan keuangan UMKM di Indonesia saat ini masih tergolong rendah, rendahnya kualitas laporan keuangan UMKM menyebabkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh positif terhadap besarnya jumlah kredit yang diterimanya.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/22/PBI/2012 pasal 5 mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan UMKM dalam memberikan kredit atau pembiayaan UMKM, yang menjadi salah satu persyaratannya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan keuangan yang disediakan UMKM.

Salah satu program pembiayaan UMKM yang dijalankan oleh pemerintah adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang pada tahun 2009 ditargetkan sekitar Rp20 triliun. Tujuan dari KUR tersebut adalah untuk menjadi solusi pembiayaan modal yang efektif bagi UMKM, sebab selama ini banyak UMKM yang terkendala akses terhadap perbankan untuk mendapatkan pembiayaaan. Namun realisasi KUR tersebut jauh dari target Rp 20 triliun yakni hanya sebesar Rp 14,8 triliun (Rizki dan Sylvia Veronica, 2012).

Bank Indonesia melaporkan bahwa anggaran pemberian kredit untuk UMKM di setiap tahunnya mengalami peningkatan, namun realisasinya kredit UMKM mengalami penurunan. Berikut laporan perkembangan kredit UMKM yang tercatat di Bank Indonesia pada tahun 2011-2013 :

Tabel 1.1

Anggaran dan Realisasi Kredit Usaha Rakyat Untuk UMKM

Tahun	2011	2012	2013
Anggaran	128,2 triliun	151triliun	164 triliun
Realisasi	85,6 triliun	32,2 triliun	79 trliun
% dari anggaran	66,8%	21,3%	48,1%

Sumber : Bank Indonesia (www.bi.go.id)

Baas dan Schrooten (2006), dalam penelitiannya menyatakan bahwa penyebab rendahnya penyaluran KUR tersebut karena bank yang ditunjuk sebagai penyalur KUR sangat berhati-hati dalam penyaluran kredit, karena mereka tidak mendapatkan informasi yang memadai terkait kondisi UMKM. Mayoritas pengusaha UMKM tidak mampu memberikan informasi akuntansi terkait kondisi usahanya

Akuntansi merupakan indikator kunci kinerja usaha, informasi akuntansi berguna bagi pengambilan keputusan sehingga dapat meningkatkan pengelolaan perusahaan. Hal ini memungkinkan para pelaku UMKM dapat mengidentifikasi dan memprediksi area-area permasalahan yang mungkin timbul, kemudian mengambil tindakan koreksi tepat waktu. Para pelaku UMKM tidak hanya dapat menghitung untung atau rugi, tetapi yang terpenting untuk dapat memahami makna untung atau rugi bagi usahanya.

Laporan keuangan yang merupakan hasil dari akuntansi menjadi salah satu komponen yang mutlak harus dimiliki oleh UMKM jika mereka ingin mengembangkan usaha dengan mengajukan modal kepada para investor. Untuk itu, kebiasaan untuk mencatat setiap kegiatan usaha yang terjadi dan menyusun laporan keuangan harus ditumbuhkan di kalangan UMKM.

Menurut SAK ETAP, tujuan laporan keuangan entitas kecil dan menengah adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (*stewardship*) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Praktek akuntansi, khususnya akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia masih rendah dan memiliki banyak kelemahan. Kelemahan itu, antara lain disebabkan rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dari manajer pemilik dan karena tidak adanya peraturan yang mewajibkan penyusunan laporan keuangan bagi UMKM. (Wahdini dan Suhairi 2006).

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) pada tahun 2009 telah mensahkan Standar Akuntansi untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). SAK ETAP tersebut akan berlaku efektif per 1 Januari 2009 namun penerapan sebelum tanggal efektif diperbolehkan. Penggunaan SAK ETAP ini adalah ditujukan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik yakni entitas yang: 1) Tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, dan 2) Entitas yang menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. SAK ETAP merupakan standar akuntansi yang penggunaannya ditujukan untuk entitas usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik, seperti entitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). SAK ETAP ini lebih mudah dipahami dan tidak sekompleks

SAK Umum. Selain adanya SAK ETAP tersebut, kemudahan lain bagi UMKM dalam hal pembukuan akuntansi adalah semakin banyaknya *software* akuntansi yang dapat digunakan UMKM. Kedepannya diharapkan UMKM mampu melakukan pembukuan akuntansi untuk menyajikan laporan keuangan sehingga lebih mudah bagi para pengusaha UMKM untuk memperoleh pembiayaan.

Berdasarkan uraian singkat yang diungkapkan diatas yang mengindikasikan bahwa UMKM mengalami kesulitan dalam mendapatkan kredit, salah satu penyebabnya adalah keterbatasan informasi yang mampu diberikan oleh UMKM kepada pihak eksternal maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH KUALITAS LAPORAN KEUANGAN TERHADAP PENERIMAAN DANA PINJAMAN (Survey UMKM di Dinas PERINDAG & KUKM di Kota Bandung)."**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, penulis mengidentifikasikan masalah yang akan menjadi pokok pemikiran dan pembahasan adalah seberapa besar pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap penerimaan dana pinjaman pada UMKM.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui, diantaranya :

1. Pengaruh persepsi pengusaha UMKM terkait pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan bagi usahanya kualitas laporan keuangan UMKM.

2. Pengaruh kualitas laporan tersebut pada besaran kredit yang disetujui oleh bank.

1.4 Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

   Penelitian yang dilakukan secara langsung ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang masalah yang akan diteliti yaitu Kualitas Laporan Keuangan terhadap Penerimaan Dana Pinjaman (Survey UMKM) serta melihat kesesuaian teori yang ada dengan praktik di lapangan.

2. Bagi Pembaca

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan dalam bidang yang sesuai dengan teori yang diperoleh dalam perkuliahan serta mewujudkan skripsi sebagai salah satu syarat menempuh tujuan sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

3. Kegunaan Praktis

   Sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang dapat digunakan dalam mengevaluasi program atau kebijakan yang telah ditetapkan agar UMKM mendapatkan pinjaman dari bank.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data dan menjawab masalah yang sedang diteliti, penulis melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan dan mencari data dari Dinas PERINDAG & KUKM di Kota Bandung. Waktu Penelitian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2014 sampai dengan selesai.